



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999, 2020

BNN. BNNP. BNNK/Kota. OTK. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

BNNP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;

- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Pasal 8

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;

- e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi;
- f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 11

Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- (2) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

BAB II
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
- (3) BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

Pasal 14

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

BNNK/Kota terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi.
- (3) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BNNP.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- b. kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P4GN BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 28

- (1) Kepala BNNP melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala BNN.
- (2) Kepala BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala BNNP merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian pada BNNP, Kepala Bidang pada BNNP, dan Kepala BNNK/Kota merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Seksi pada BNNP dan Kepala Subbagian pada BNNK/Kota merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30

- (1) Seluruh pejabat struktural pada BNNP dan BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP dan BNNK/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 32

- (1) Penetapan jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota didasarkan pada kriteria dan analisis beban kerja.

- (2) Penetapan jumlah, lokasi dan pedoman kriteria BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 33

Bagan Struktur organisasi BNNP dan BNNK/Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdapat 34 (tiga puluh empat) BNNP dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) BNNK/Kota.
- (2) Daftar Lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan

BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HERU WINARKO

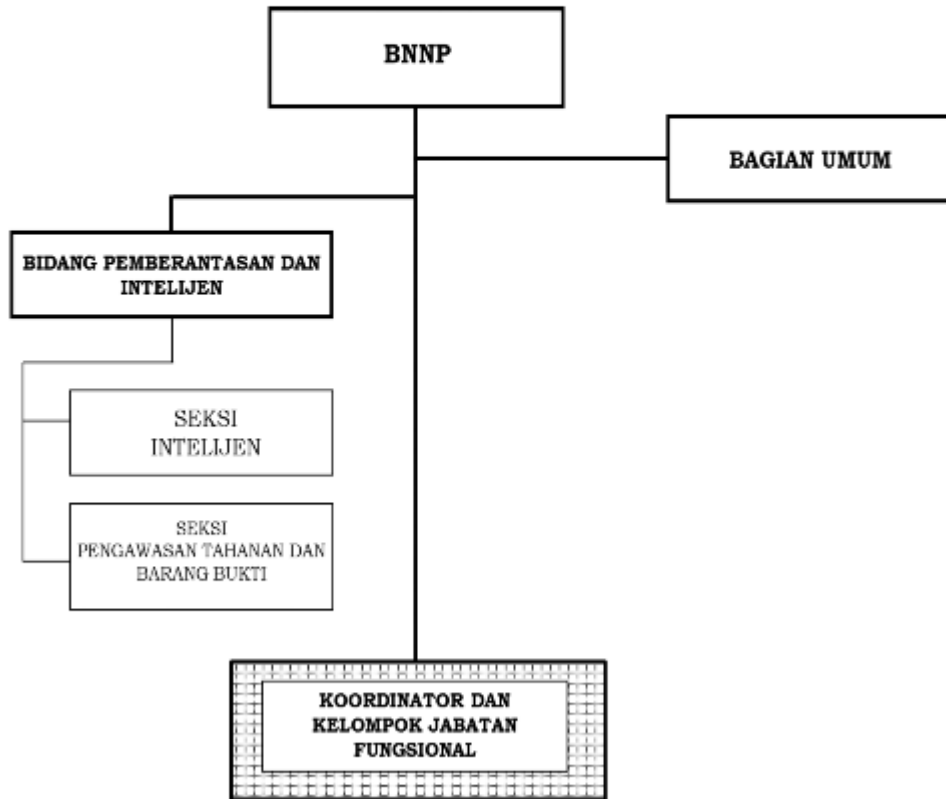
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

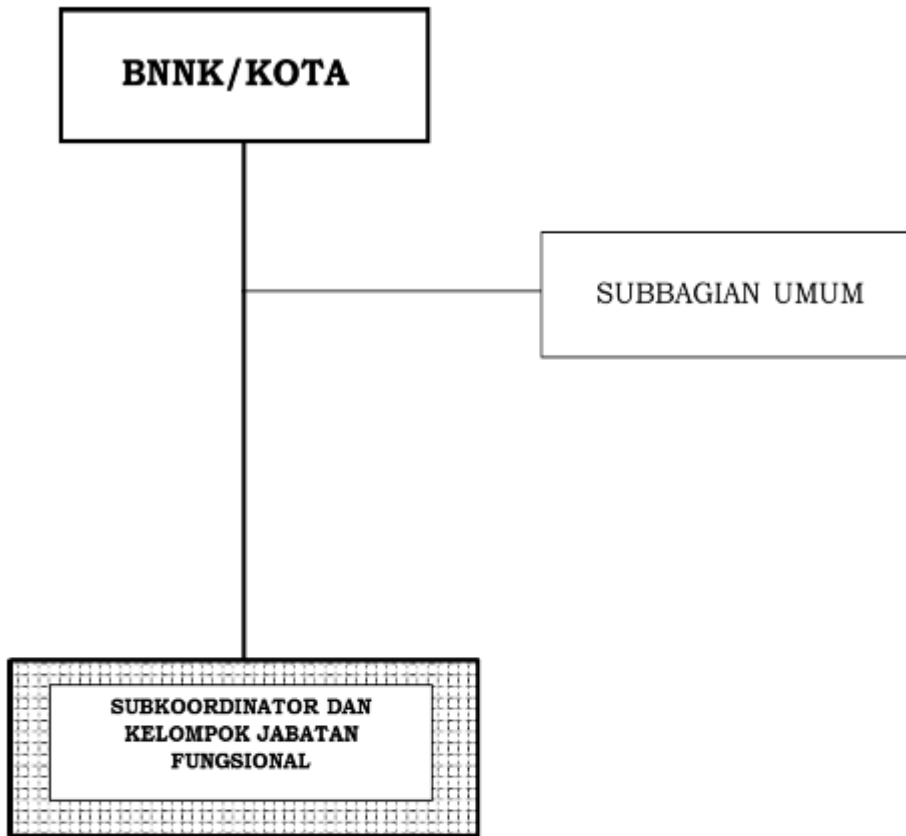
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA





REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

| NO. | UNIT ORGANISASI | ESELON | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| | | II.a | III.a | IV.A |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | BNNP | 1 | - | - |
| 2 | BNNK/KOTA | - | 1 | - |
| 3 | BAGIAN UMUM | - | 1 | - |
| 4 | BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELJEN | - | 1 | 2 |
| 5 | SUBBAGIAN UMUM | - | - | 1 |
| JUMLAH | | 1 | 3 | 3 |

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HERU WINARKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DAN LOKASI
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

| No | BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA | LOKASI |
|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh | Banda Aceh |
| 1.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Langsa | Langsa |
| 1.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe |
| 1.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireun | Bireun |
| 1.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan |
| 1.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu |
| 1.6 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues | Blangkejeren |
| 1.7 | Badan Narkotika Nasional Kota Sabang | Sabang |
| 1.8 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru |
| 1.9 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie | Sigli |
| 1.10 | Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh | Banda Aceh |
| 2. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara | Medan |
| 2.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar | Pematang Siantar |
| 2.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deliserdang | Deliserdang |
| 2.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat | Langkat |
| 2.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan | Asahan |
| 2.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal | Mandailing Natal |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|--|------------------|
| | 2.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan | Tapanuli Selatan |
| | 2.7 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai | Serdang Bedagai |
| | 2.8 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo | Kabanjahe |
| | 2.9 Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai |
| | 2.10 Badan Narkotika Nasional Kota Binjai | Binjai Kota |
| | 2.11 Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli | Gunung Sitoli |
| | 2.12 Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi |
| | 2.13 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhan Batu Utara | Aek Kanopan |
| | 2.14 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara | Lima Puluh |
| | 2.15 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun | Raya |
| 3. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat | Padang |
| | 3.1 Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh | Payakumbuh |
| | 3.2 Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto | Sawahlunto |
| | 3.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok | Arosuka |
| | 3.4 Badan Narkotika Nasional Pasaman Barat | Simpang Ampek |
| 4. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan | Palembang |
| | 4.1 Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam | Pagar Alam |
| | 4.2 Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau |
| | 4.3 Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih | Prabumulih |
| | 4.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang | Empat Lawang |
| | 4.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir | |
| | 4.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas | |

| 1 | 2 | | 3 |
|----|--|--|-------------------|
| | 4.7 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim | |
| | 4.8 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir | |
| | 4.9 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | |
| 5. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi | | Jambi |
| | 5.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Jambi | Jambi |
| | 5.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari | Batanghari |
| | 5.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muaro Sabak |
| 6. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau | | Pekanbaru |
| | 6.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru | Pekanbaru |
| | 6.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan |
| | 6.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelelawan | Pangkalan Kerinci |
| | 6.4 | Badan Narkotika Nasional Kota Dumai | Dumai |
| 7. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu | | Bengkulu |
| | 7.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu | Bengkulu |
| | 7.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan | Manna |
| 8. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung | | Bandar Lampung |
| | 8.1 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan | Lampung Selatan |
| | 8.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus | Kota Agung |
| | 8.3 | Badan Narkotika Nasional Kota Metro | Metro |
| | 8.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur | Sukadana |
| | 8.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|-----------------------|
| 9. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang |
| 9.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 9.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung | Belitung |
| 9.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka | Sungai Liat |
| 9.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Selatan | Toboali |
| 10. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau | Batam |
| 10.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang | Tanjungpinang |
| 10.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun |
| 10.3 | Badan Narkotika Nasional Kota Batam | Kota Batam |
| 11. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten | Banten |
| 11.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan | Ciputat |
| 11.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon | Cilegon |
| 11.3 | Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang | Tangerang |
| 12. | Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| 12.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan | Jakarta Selatan |
| 12.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur | Jakarta Timur |
| 12.3 | Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara | Jakarta Utara |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|--|----------------|
| 13. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat | Bandung |
| | 13.1 Badan Narkotika Nasional Kota Depok | Depok |
| | 13.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut | Garut |
| | 13.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan | Kuningan |
| | 13.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis | Ciamis |
| | 13.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang | Karawang |
| | 13.6 Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon | Cirebon |
| | 13.7 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor | Cibinong |
| | 13.8 Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi | Cimahi |
| | 13.9 Badan Narkotika Nasional Kota Bandung | Bandung |
| | 13.10 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur | Cianjur |
| | 13.11 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi | Palabuhan Ratu |
| | 13.12 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
| | 13.13 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang | Sumedang |
| | 13.14 Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
| 14. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah | Semarang |
| | 14.1 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap | Cilacap |
| | 14.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal | Kendal |
| | 14.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang | Batang |
| | 14.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
| | 14.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung | Temanggung |
| | 14.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas | Purwokerto |
| | 14.7 Badan Narkotika Nasional Kota Tegal | Tegal |
| | 14.8 Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta | Surakarta |
| | 14.9 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang | Mungkid |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|----------------------------|
| 15. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 15.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta | Yogyakarta |
| 15.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman | Sleman |
| 15.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul | Bantul |
| 16. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur | Surabaya |
| 16.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Batu | Batu |
| 16.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Malang | Malang |
| 16.3 | Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya | Surabaya |
| 16.4 | Badan Narkotika Nasional Kota Kediri | Kediri |
| 16.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
| 16.6 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
| 16.7 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang | Malang |
| 16.8 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik | Gresik |
| 16.9 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
| 16.10 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang | Lumajang |
| 16.11 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar | Blitar |
| 16.12 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri | Kediri |
| 16.13 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
| 16.14 | Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto | Mojokerto |
| 16.15 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep | Sumenep |
| 16.16 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan | Bangil |
| 16.17 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban | Tuban |

| 1 | 2 | 3 | |
|----------|---|--|---------------|
| 17. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali | Denpasar | |
| | 17.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar | Denpasar |
| | 17.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung | Badung |
| | 17.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar | Gianyar |
| | 17.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karang Asem | Amlapura |
| | 17.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng | Singaraja |
| | 17.6 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung | Semarapura |
| 18. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat | Mataram | |
| | 18.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Mataram | Mataram |
| | 18.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat | Sumbawa Barat |
| | 18.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima | Woha |
| | 18.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar |
| 19. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kupang | |
| | 19.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Kupang | Kupang |
| | 19.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao | Rote Ndao |
| | 19.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu | Atambua |
| 20. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat | Pontianak | |
| | 20.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang | Singkawang |
| | 20.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak | Pontianak |
| | 20.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau | Sanggau |
| | 20.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pontianak | Pontianak |
| | 20.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
| | 20.6 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang | Sintang |
| | 20.7 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya |

| 1 | 2 | 3 | |
|----------|--|--|---------------|
| 21. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur | Balikpapan | |
| | 21.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda | Samarinda |
| | 21.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan | Balikpapan |
| | 21.3 | Badan Narkotika Nasional Kota Bontang | Bontang |
| 22. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara | Tanjung Selor | |
| | 22.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan | Tarakan |
| | 22.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan | Nunukan |
| 23. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | |
| | 23.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin | Banjarmasin |
| | 23.2 | Badan Narkotika Nasional Kota Banjar Baru | Banjar Baru |
| | 23.3 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan | Paringin |
| | 23.4 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala | Marabahan |
| | 23.5 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan |
| | 23.6 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
| | 23.7 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari |
| | 23.8 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong | Tanjung |
| 24. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah | Palangkaraya | |
| | 24.1 | Badan Narkotika Nasional Kota Palangkaraya | Palangkaraya |
| | 24.2 | Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|---|--------------|
| 25. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara | Manado |
| | 25.1 Badan Narkotika Nasional Kota Manado | Manado |
| | 25.2 Badan Narkotika Nasional Kota Bitung | Bitung |
| | 25.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow | Lolak |
| | 25.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
| 26. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan | Makasar |
| | 26.1 Badan Narkotika Nasional Kota Palopo | Palopo |
| | 26.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja | Makale |
| | 26.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone | Watampone |
| 27. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara | Kendari |
| | 27.1 Badan Narkotika Nasional Kota Kendari | Kendari |
| | 27.2 Badan Narkotika Nasional Kota Kolaka | Kolaka |
| | 27.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna | Raha |
| | 27.4 Badan Narkotika Nasional Kota Bau Bau | Bau Bau |
| 28. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat | Mamuju |
| | 28.1 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
| 29. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah | Palu |
| | 29.1 Badan Narkotika Nasional Kota Palu | Palu |
| | 29.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali | Morowali |
| | 29.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala | Donggala |
| | 29.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso | Poso |
| | 29.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una | Tojo Una-Una |
| | 29.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan | Salakan |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|---|------------------|
| 30. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo | Gorontalo |
| | 30.1 Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo | Gorontalo |
| | 30.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango | Suwawa |
| | 30.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo | Tilamuta |
| | 30.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo | Limboto |
| | 30.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang |
| 31. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku | Ambon |
| | 31.1 Badan Narkotika Nasional Kota Tual | Tual |
| | 31.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru Selatan | Namrole |
| 32. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara | Ternate |
| | 32.1 Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan | Halmahera Tengah |
| | 32.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo |
| | 32.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai | Daruba |
| 33. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua | Jaya Pura |
| | 33.1 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jaya Pura | Jaya Pura |
| | 33.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika | Timika |
| 34. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat | Manokwari |

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO